

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan yang kini dihadapi oleh bangsa Indonesia, merupakan persoalan perempuan karena perempuanlah yang langsung dihadapkan pada persoalan dan krisis di tengah-tengah sistem dan nilai-nilai yang tidak adil terhadap perempuan. Peran dan fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki baik secara fisik maupun psikisnya. Isu mengenai kiprah perempuan di sektor publik nampaknya tidak pernah sepi dari perbincangan. Hal ini dikarenakan permasalahan sosial yang belumimbang.

Pergerakan dan perjuangan perempuan Indonesia menunjukkan semakin maju dan meningkat. Pergerakan dan perjuangan tersebut bukan sekedar untuk mendapatkan persamaan kedudukan dan hak seperti kaum laki-laki, namun juga untuk lebih dapat melakukan perannya dalam kehidupan keluarga, masyarakat serta dalam kehidupan pemerintahan. Kini kaum perempuan semakin menyadari bahwa perempuan juga merupakan salah satu kekuatan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban tidak kalah pentingnya dengan kekuatan masyarakat lainnya serta mempunyai tanggung jawab bersama melakukan perannya dalam masa pembangunan guna meningkatkan ketahanan nasional.

Gender merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin. Bagaimanapun gender memang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu berhubungan dengan perbedaan fisiologis seperti selama ini banyak dijumpai dalam masyarakat. Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentuk budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan, gender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran- peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. (Siti Musdah Mulia, Dkk 2001)

Adanya penyetaraan gender memang selalu menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun non akademisi dari zaman ke zaman. Sehingga persoalan ini akan terus diangkat sepanjang kaum perempuan benar-benar merasakan hak-haknya dan tidak adanya bias gender. Kesetaraan gender adalah keadaan dimana perempuan dan laki-laki dapat menikmati status dan kondisi yang sama dan potensi yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan. Dengan kata lain kesetaraan gender adalah penilaian yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran yang mereka lakukan.

Saat ini keterlibatan perempuan di sektor publik sudah banyak dijumpai. Masyarakat memandang positif aktivitas perempuan di sektor publik. Karena selain merupakan manifestasi persamaan hak laki-laki dan

perempuan, tetapi juga dapat memberikan keuntungan finansial bagi keluarga juga kontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya bidang ekonomi. Walaupun masih sedikit perempuan yang menduduki jabatan atau struktural tinggi dalam sebuah perusahaan, sebagai besar hanya bekerja sebagai buruh/ asisten rumah tangga/ berdagang.

Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. (Alfian,Rokhmansyah,2016)

Tapi dalam realita kehidupan banyak faktor yang mempengaruhi seperti lingkungan budaya dan tradisi patriarki, sistem ekonomi politik, sikap dan perilaku individu yang menentukan status perempuan dan ketimpangan gender, dalam kondisi seperti ini harus ada pemberdayaan terhadap perempuan serta penyadaran akan hak dan status mereka yang islami.

Pemenuhan hak-hak politik perempuan merupakan salah satu jalan bagi perbaikan nasib perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan bukan tujuan akhir, namun merupakan *entri point* bagi

perjuangan demi jutaan nasib perempuan lainnya dalam mencapai kesetaraan gender.

Keterwakilan perempuan dalam politik dapat memberikan pengaruh terhadap fasilitasi berbagai kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan secara efektif sehingga terakomodasi dalam berbagai output kebijakan. Kedudukan dan peran politik perempuan dalam struktur politik masih sangat kurang, karena adanya dominasi laki-laki dalam partai politik termasuk struktur politik yang menempatkan aktivitas politik pada tingkatan paling rendah. Peran perempuan dalam dunia politik sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk memenuhi haknya sebagai warga Negara untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara tetapi juga untuk ikut melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan Negara itu sendiri. Kurangnya kepercayaan dalam diri perempuan untuk bisa maju dan berpartisipasi dalam dunia politik, karena masih dipengaruhi oleh norma budaya dan masih melekat sistem budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Persoalan yang terkait dengan perempuan yang dihadapi UU desa yaitu kurangnya partisipasi perempuan dalam berbagai forum pertemuan musyawarah desa. Persentase perempuan di dalam Musrenbangdes (musyawarah perencanaan dan pengembangan desa) tidak pernah lebih dari 20%. Diperlukan peran aktif perempuan dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi desa sehingga tercapai kemandirian ekonomi desa-desa di Indonesia. Selain itu, diperlukan juga keterbukaan pemerintah pada partisipasi perempuan dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Demokrasi yang efektif yaitu adanya kerjasama antara perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kegiatan kemasyarakatan, kesetaraan dan saling melengkapi satu sama lain. Kehadiran perempuan dalam penguatan sistem demokrasi merupakan Hak Asasi Manusia, bahwa perempuan hadir dalam proses pengambilan keputusan politik. Keterwakilan politik perempuan diperlukan adanya pendidikan politik, tujuan dari pendidikan politik yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Perempuan yang bekerja di sektor publik hingga saat ini masih belum optimal. Rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor publik dipengaruhi beberapa aspek, seperti budaya, sosial, dan agama. Di berbagai daerah (baik di kota maupun di desa), aspek-aspek tersebut mempengaruhi partisipasi perempuan dalam taraf dan bentuk yang berbeda-beda. Sehingga dibutuhkan program dan kegiatan untuk mendorong kesadaran perempuan agar aktif dalam berbagai proses politik dan pengambilan keputusan pada berbagai level termasuk di Desa/Kelurahan. Wacana bahwa perempuan dan laki-laki di sektor publik dan perempuan di sektor domestik adalah kurang tepat. Perempuan yang masuk ke sektor publik tidak hanya disertai profesi tertentu seperti harus berperan sebagai anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR) tetapi peran di sektor publik juga bisa dilakukan dengan mengikuti kegiatan pengajian,

posyandu dan lainnya. Perempuan dapat menjalani kedua peran dengan baik, dimulai dari rumah tangga dengan melakukan komunikasi yang baik antara suami dan istri, bahwa anak dan keharmonisan rumah tangga menjadi tanggungjawab bersama. Tidak semua perempuan ingin bekerja atau masuk kedalam dunia kerja, bagi perempuan yang tidak berpendidikan rendah mereka hanya ingin beraktifitas di dalam rumah saja, karena beranggapan bahwa perempuan yang tidak berpendidikan tidak pantas jika masuk ke dunia pekerjaan. Akan tetapi melihat kondisi saat ini, banyak seorang ibu rumah tangga yang bisa membantu perekonomian keluarga melalui ponselnya, yang dimana adalah berbisnis secara online yang dapat dilakukan di dalam tanpa mengurangi waktu bersama keluarganya, akan tetapi penghasilan tidak sebesar ketika bekerja diluar.

Dimana hal ini sama dengan peneliti yang mengambil tentang kesetaraan gender di Desa Dayeuhluhur. Dalam praktiknya tujuan dari kesetaraan gender agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Dengan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang umumnya masih rendah, dimana mayoritas pendidikannya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun hanya sampai Sekolah Dasar (SD) sehingga pengetahuan pendidikan yang mereka ketahui terbatas. Banyaknya perempuan yang tingkat pendidikannya rendah ketimbang tingkat

pendidikan laki-laki yang disebabkan masih ada ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan yang menjadi kebiasaan bahwa banyak yang mengatakan buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi nantinya juga akan kembali pada sektor domestik yaitu dapur, sumur dan kasur. Banyaknya yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak setara dengan laki-laki.

Kondisi saat ini di Desa Dayeuhluhur ada sebagian masyarakat yang masih menganut budaya tradisional, keluarga dan rumah tangga memiliki tipe keluarga sendiri. Sebagian perempuannya memiliki peran ganda dalam rumah tangga, ada yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Konsep gender ada untuk menegakkan kesetaraan sehingga laki-laki dan perempuan saling membantu dalam tugas-tugas domestik dirumah tangga sehingga tidak hanya perempuan yang melakukannya. Problem yang banyak muncul adalah dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan adanya kurang paham dengan konsep gender dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat itu sendiri. Adanya konsep kesetaraan gender itu menepikan sifat perempuan yang tidak mau memperdayakan diri atau bertanggung jawab pada dirinya sendiri karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan orang lain.

Di Desa Dayeuhluhur masih banyak perempuan yang tidak ingin memperdayakan dirinya sendiri hanya untuk mengikuti tradisi atau malah mereka menerima kodratnya. Dalam kasus seperti ini kondisi ketimpangan

gender harus ditangani secara serius, karena jika tidak maka akan timbul berbagai ketidakadilan yang menimpa manusia, baik laki-laki maupun perempuan karena kesetaraan gender merupakan suatu isu bagi semua orang. Tetapi tidak sedikit masyarakat di Desa Dayeuhluhur yang masih berfikir bahwa membicarakan kesetaraan gender merupakan sesuatu yang mengada-ngada, yang terlalu dibesar-besarkan. Karena banyak yang berfikir perempuan dan laki-laki harus dibedakan dalam kalangan keluarga maupun dalam masyarakat. Pada nyatanya tetap terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan tolak ukur. Pemberian gaji atau upah kepada laki-laki dan perempuan memang semakin besar apabila tingkat pendidikan mereka semakin tinggi, karena hal tersebut mempengaruhi tingkat dan kualitas keterampilan dari penerima upah. Namun di samping itu, upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan tidaklah sama walaupun tingkat pendidikan mereka setara. Disetiap tingkat pendidikan yang mereka tempuh, tetap terdapat kesenjangan bahwa perempuan menerima upah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki di tingkat pendidikan yang sama. Kesenjangan tersebut tidak hanya didasari oleh perbedaan daerah tempat tinggal dan tingkat pendidikan, status perkawinan pun dijadikan dasar perlakuan ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam pemberian upah. Status perkawinan baik cerai hidup, cerai mati, kawin, maupun belum kawin menunjukkan perbedaan pemberian gaji terhadap laki-laki dan perempuan di dunia kerja. Sehingga banyaknya ketidaksetaraan gender di Desa

Dayeuhluhur seperti salah satu contoh buruh tani perempuan yang dibayar lebih murah ketimbang buruh tani laki-laki.

Sehingga di Desa Dayeuhluhur kesetaraan gender belum sepenuhnya dapat terwujud karena masih kuat pengaruh nilai-nilai sosial budaya patriarkisnya. Yang dimana nilai-nilai ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setaraan. Padahal laki-laki maupun perempuan merupakan makhluk biasa yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang dibawa sejak lahir. Masing-masing dari mereka pasti memiliki sifat yang lemah lembut, perasa, penakut pemberani, tegas, pemalu dan lainnya. Sifat tersebut bisa ada pada siapapun, tidak peduli apakah dia perempuan ataupun laki-laki. Akan tetapi konstruksi budaya di masyarakat merubah pandangan netral pada sifat gender tersebut.

Pendidikan Politik bagi perempuan di Desa Dayeuhluhur masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan bahwa kaum perempuan di Desa Dayeuhluhur tidak pernah mengenyam atau mendapatkan pendidikan politik. Maka dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang kesetaraan gender dalam politik desa serta bentuk kesetaraan yang lain dan ketidaksetaraannya dalam masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah Bagaimana

implementasi kesetaraan gender dalam politik desa di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap?

1.2 Pembatasan Masalah

Agar dalam tulisan ini tidak keluar dari tujuan penulis serta memudahkan dalam mendapatkan data informasi, maka penulis membatasinya dalam konteks implementasi kesetaraan gender dalam politik desa di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kesetaraan gender dalam politik desa di Desa Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai kajian tentang gender dan kajian yang mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang sejenis berkaitan dengan tentang kesetaraan gender dan kesetaraan gender dalam politik desa, konsep gender dalam masyarakat yang dimana sering disalah artikan. Serta memberikan sedikit wacana dalam keilmuan tentang kesetaraan gender.